

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Dokumen ini memuat Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada Rabu, 2 September 2026, setelah fraksi membaca, mencermati, dan mempelajari dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pokok pandangan Fraksi Partai Gerindra mencakup apresiasi terhadap penyusunan Raperda Perubahan APBD sebagai penyesuaian atas perkembangan kondisi fiskal dan kebutuhan pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan. Fraksi mencermati kenaikan Belanja Daerah dari sekitar Rp2,99 triliun menjadi sekitar Rp3,13 triliun, penurunan Pendapatan Daerah menjadi sekitar Rp2,91 triliun, serta meningkatnya defisit anggaran menjadi sekitar Rp221,11 miliar. Fraksi meminta penjelasan apakah tambahan belanja telah diarahkan secara optimal pada program prioritas yang dibutuhkan masyarakat dan telah didukung target serta indikator kinerja yang jelas.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan komposisi PAD berupa penurunan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tengah kenaikan retribusi daerah, serta pengurangan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Selain itu, fraksi mengapresiasi peningkatan belanja modal, khususnya belanja jalan, jaringan, dan irigasi, serta peningkatan anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada prinsipnya, Fraksi Partai Gerindra sepakat melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD ke tahap berikutnya dengan menekankan ketelitian, kehati-hatian, keterbukaan, dan penggunaan data yang lengkap, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan: Pandangan Umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 2 September 2026 oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen. Pandangan Umum dibacakan oleh juru bicara Basir. Dokumen ditandatangani oleh Maksum Sodik selaku Ketua Fraksi dan Bambang Suparjo selaku Sekretaris Fraksi.

Kata Kunci: Pandangan Umum Fraksi; Fraksi Gerindra; Perubahan APBD; SiLPA; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Belanja Hibah; Pelayanan Dasar.

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026, GENERAL OPINION OF THE GERINDRA PARTY FACTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2026.

This document contains the General Opinion of the Gerindra Party Faction of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2026. The opinion was delivered at a plenary meeting on Wednesday, 2 September 2026, after the faction reviewed and examined the draft revised regional budget document.

The main points include the faction's appreciation for the preparation of the revised budget as an adjustment to fiscal developments and the needs of ongoing development programs. The faction notes the increase in regional expenditure from approximately Rp2.99 trillion to Rp3.13 trillion, the decrease in regional revenue to approximately Rp2.91 trillion, and the resulting budget deficit of approximately Rp221.11 billion. It requests clarification on whether the additional expenditure has been optimally directed toward priority programs needed by the public and supported by clear targets and performance indicators.

The faction also highlights the use of the 2025 budget surplus as financing to cover the 2026 revised budget deficit, changes in the composition of local own-source revenue, the decline in regional tax revenue and revenue from separated regional assets, and the increase in regional levies. Further attention is given to reductions in grant expenditure, social assistance, and financial assistance, as well as increased capital expenditure, particularly for roads, networks, and irrigation, and increased allocations for mandatory government affairs related to basic services. In principle, the Gerindra Party Faction agrees to continue the deliberation of the draft revised budget to the next stage, emphasizing accuracy, prudence, openness, and the use of complete, valid, and accountable data.

Note: *This General Opinion was delivered at a plenary meeting of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on 2 September 2026 by the Gerindra Party Faction. It was read by spokesperson Basir. The document was signed by Maksum Sodik as Faction Chairperson and Bambang Suparjo as Faction Secretary.*

Keywords: *General Opinion of Faction; Gerindra Faction; Revised Regional Budget; Budget Surplus; Local Own-Source Revenue; Capital Expenditure; Grant Expenditure; Basic Services.*